



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA,
STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.001.01**

BUKU PENILAIAN



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan bidang kerjanya. Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan Modul Pelatihan (Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi) untuk jabatan kerja **Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota** mengacu kepada SKKNI Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, yang dalam penjabarannya kepada program pelatihan tertuang pada Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK). Penyusunan KPBK dilakukan dengan mengidentifikasi Unit-unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang merupakan dasar rumusan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya memenuhi kompetensi standar seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga dimungkinkan adanya tambahan materi-materi lainnya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari standar yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja

Penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan diantaranya Focus Group Discussion serta Workshop yang melibatkan para nara sumber, praktisi, pemangku jabatan serta stakeholder. Dengan keterbatasan pelibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan modul ini, dan seiring dengan perkembangan dan dinamika teknologi konstruksi kedepan, maka tetap diupayakan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan sejalan dengan dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan modul ini dilapangan melalui respon peserta pelatihan, instruktur, asesor serta semua pihak.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan modul ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan ini.

Jakarta, Nopember 2012

PUSAT PEMBINAAN
KOMPETENSI DAN PELATIHAN
KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	1
BAB I KONSEP PENILAIAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Metoda Penilaian	2
BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN	4
3.1 Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)	4
3.2 Daftar Cek Unjuk Kerja (Praktek)	8

Lampiran 1 Jawaban Tugas Tertulis I
Lampiran 2 Jawaban Tugas Tertulis II
Lampiran 3 Jawaban Tugas Tertulis III

BAB I

KONSEP PENILAIAN

1.1 Latar Belakang

Buku penilaian untuk unit kompetensi Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (*exercise*) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

1.3 Metoda Penilaian

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

a. Tes Tertulis

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup dalam bentuk Jawaban Singkat, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif penilai.

b. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara penilai dengan peserta uji/peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

2. Metoda Penilaian Keterampilan

a. Tes Simulasi

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai keterampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan (bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

b. **Aktivitas Praktik**

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya. Namun dalam pelaksanaan pelatihan untuk unit kompetensi ini, metoda penilaian ini tidak digunakan.

3. **Metoda Penilaian Sikap Kerja**

a. **Observasi**

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN

2.1 Kunci Jawaban Tugas-Tugas (Teori)

Tugas Teori I : Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perencanaan

Pelatihan: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Waktu: 30 menit

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

a. Jawaban Singkat

1. Lakukan identifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu perencanaan yang ada (minimal 3 kategori peraturan)!

.....
.....
.....
.....

2. Sebutkan peraturan perundangan yang terkait dengan pengembangan kota hijau!

.....
.....
.....
.....

3. Sebutkan substansi dalam Undang-Undang No. 26 dan 27 yang mengatur tentang pengendalian pemanfaatan ruang!

.....
.....
.....
.....

b. Benar / Salah

7. B S Apakah UU No. 18/1999 terkait dengan penataan ruang? Sebutkan alasannya!

2.1.1 Lembar Kunci Jawaban Teori I

NO. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA			KETERANGAN
			K	BK	
1	Lampiran I				
2	Lampiran I				
3	Lampiran I				
4	B				

Tugas Teori II : Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan criteria (NSPK)

Pelatihan : Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Waktu : 30 menit

Petunjuk Umum

- Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
- Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
- Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

a. Jawaban Singkat

- Menurut pendapat anda apa yang dimaksud dengan NSPK?

.....

- Sebutkan NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada dirinci berdasarkan pendekatan sektoral (minimal 3 sektor)!

.....

3. Jelaskan alasan setiap pemilihan NSPK pada pertanyaan diatas dengan penataan ruang!

.....

4. Jelaskan substansi dari salah satu pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang!

.....

c. Benar / Salah

5. B S NSPK tidak diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan KSN kawasan perkotaan metropolitan

2.1.2 Lembar Kunci Jawaban Teori II

NO. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA			KETERANGAN
			K	BK	
1	Lampiran II				
2	Lampiran II				
3	Lampiran II				
4	Lampiran II				
5	S				

- Tugas Teori III** : Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait
Pelatihan : Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman,
 Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
Waktu : 30 menit

Petunjuk Umum

1. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban/kertas yang telah disediakan;
2. Seluruh buku-buku lembaran-lembaran tulisan disimpan;
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menulis jawaban

a. Jawaban Singkat

1. Jelaskan hubungan pasal-pasal peraturan perundangan yang terkait dengan isu strategis yang telah anda pilih!

2. Buatlah resume substansi pokok terkait dengan peraturan perundangan yang telah dipilih diatas!

3. Jelaskan keterkaitan antara NSPK dalam isu strategis dengan peraturan perundangan yang lain!

2.1.3 Lembar Kunci Jawaban Tertulis III

NO. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA			KETERANGAN
			K	BK	
1	Lampiran III				
2	Lampiran III				
3	Lampiran III				

Catatan Penilai :

2.2 Daftar Cek Unjuk Kerja

Tugas Unjuk Kerja I: Melakukan identifikasi peraturan perundangan berhubungan dengan perencanaan

Instruksi kerja

- a. Hubungkan suatu Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada
- b. Hubungkan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada
- c. Kelompokkan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan

Tugas Unjuk Kerja 2: Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

Instruksi kerja

- a. Hubungkan suatu NSPK dengan isu yang ada dengan tepat secara cermat
- b. Hubungkan NSPK terpilih dengan isu yang ada
- c. Kelompokkan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan

Tugas Unjuk Kerja 3: Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait

Instruksi kerja

- a. Susun ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih
- b. Susun ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih
- c. Tunjukkan keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan.

a. Daftar Cek Unjuk Kerja

NO.	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
1.	Hubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan isu yang ada	Keterkaitan suatu peraturan perundang-undangan dengan isu yang ada				

NO.	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
2.	Hubungkan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada	Keterkaitan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada				
3.	Kelompokan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Pengelompokkan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan				
4.	Hubungkan suatu NSPK dengan isu yang ada dengan tepat secara cermat	Keterkaitan NSPK dengan isu yang ada				
5.	Hubungkan NSPK terpilih dengan isu yang ada	Keterkaitan NSPK terpilih dengan isu yang ada				
6.	Kelompokan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencana	Pengelompokkan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencana				
7.	Susun ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih	ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan				
8.	Tunjukkan keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan	pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan				

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA

TIDAK

	NAMA	TANDA TANGAN
PESERTA
PENILAI

Catatan Penilai :

a. Penilaian Sikap Kerja

CEK LIST PENILAIAN SIKAP KERJA				
Melakukan identifikasi peraturan perundangan berhubungan dengan perencanaan				
Indikator Unjuk Kerja	No. KUK	K	BK	Keterangan
Harus mampu memilih Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dengan cermat tepat	3.1			
Harus mampu memilih pasal peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan dengan cermat-dan tepat	3.2			
Harus mampu memilih dengan tepat dan cermat pasal perundangan terkait perencanaan	3.3			

CEK LIST PENILAIAN SIKAP KERJA				
Identifikasi dan Penerapan Norma,Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota				
Indikator Unjuk Kerja	No. KUK	K	BK	Keterangan
Harus Mampu memilih NSPK yang berkaitan dengan perencanaan dengan cermat	3.2			
Harus Mampu menyusun NSPK yang terkait perencanaan dengan cermat	3.3			

CEK LIST PENILAIAN SIKAP KERJA				
Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait				
Indikator Unjuk Kerja	No. KUK	K	BK	Keterangan
Harus mampu merumuskan suatu kesimpulan Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih dengan cermat	3.1			
Harus mampu membuat rangkuman Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai kebutuhan perencanaan menurut hirarki	3.3			

Lampiran 1

Jawaban Tugas Teori I

1. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu perencanaan yang ada (minimal 3 kategori peraturan)!:
Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ; tentang penanggulangan bencana (UU 24/2007); tentang Undang-undang no 27 tahun 2007 pengelolaan wilayah pesisir; Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan; Undang-undang no 32 tahun 2004 dan Undang-undang no 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan perundangan yang terkait dengan pengembangan kota hijau adalah peraturan menteri pekerjaan umum nomer: 11/PRT/M/2009 Pasal 31, Undang-Undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
3. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dalam pasal 10 disebutkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan wewenang pemerintah daerah provinsi
4. Ya, Benar. UU No. 18/1999 terkait dengan penataan ruang tentang Jasa Konstruksi dimana pekerjaan sebagai penata ruang/perencana (planner) termasuk didalamnya

Lampiran 2

Jawaban Tugas Teori II

1. Yang dimaksud dengan NSPK adalah sebagai berikut:
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berdasarkan PP 38/2007, pasal 9 bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada dirinci berdasarkan sektor (minimal 3 sektor)
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Tata Ruang (Permen PU 20/PRT/M/2007); Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (Longsor, Permen PU 22/PRT/M/2007; Letusan Gunung Berapi dan Gempa Bumi, Permen PU 21/PRT/M/2007); Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi (Permen PU 15/PRT/M/2009).
UU 25/2004 juga mewajibkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2). Hal ini sejalan dengan UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, pada Bab VII pasal 150 disebutkan bahwa daerah wajib memiliki dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 25 tahun), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah-tahunan).
3. Alasan setiap pemilihan NSPK pada pertanyaan diatas dengan penataan ruang:
Sebagai contoh pedoman kriteria teknis kawasan budidaya untuk menyusun rencana pola ruang sehingga tercapai penataan ruang yang sesuai kondisi terbaik
4. Substansi dari salah satu pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang yaitu terkait dengan pasal 65 UU no 26 tahun 2007 yaitu bahwa peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui :
 - Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
 - Partisipasi dalam pemanfaatan ruang
 - Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang
5. Salah, NSPK diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan KSN kawasan perkotaan metropolitan

Lampiran 3

Jawaban Tugas Teori III

1. Hubungan pasal-pasal peraturan perundangan yang terkait dengan isu strategis:
Perencanaan tata ruang disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terkait dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 19.
2. Buatlah resume substansi pokok terkait dengan peraturan perundangan yang telah dipilih diatas:
Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa kualitas lingkunganhidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsunganperikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pada pasal 19 yang menyebutkan bahwa tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
3. Keterkaitan antara NSPK dalam isu strategis dengan peraturan perundangan yang lain:
Isu strategis yang ada saat ini adalah isu bencana, yang sudah dinyatakan juga oleh RPJM 2010-2014 bahwa indonesia berada pada lempeng Australia dan Eurasia juga menjadikan Indonesia memiliki kerentanan akan bencana. NSPK yang terkait dengan kebencanaan tersebut diantaranya Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (Longsor, Permen PU 22/PRT/M/2007; Letusan Gunung Berapi dan Gempa Bumi